

Laporan Kegiatan Policy Talks
Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Tengah Krisis Geopolitik

Hari, Tanggal tayang	Selasa, 19 Mei 2026
Tempat	Zoom Meeting
Waktu	14.00 – 15.30 WIB
Pembicara	1. Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute) 2. Anggi Pertiwi Putri (Perencana Ahli Muda, Koordinator Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kementerian PPN/Bappenas)

Ringkasan

Pada hari Selasa, 19 Mei 2026, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengadakan sebuah diskusi publik dengan judul di atas yang membahas strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah krisis geopolitik yang sedang terjadi. Dalam diskusi, Putu menyampaikan kondisi keuangan negara terkini yang tengah terombang-ambing imbas kenaikan nilai tukar rupiah dengan dollar. Dari iklim investasi, Putu menyoroti hal ini berisiko meningkatkan laju *capital outflow* yang turut diperparah dengan kesehatan fiskal negara Indonesia.

Merespons hal ini, Putu turut menjelaskan bahwa dinamika ini telah memengaruhi kestabilan harga komoditas yang diperjualbelikan di pasar. Untuk itu, dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, tentunya pemerintah memerlukan upaya responsif untuk memitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan agar tidak makin memperlebar ketimpangan serta menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat paling rentan, terutama kuintil terbawah. Anggi Putri dari Bappenas kemudian menyampaikan dalam beradaptasi dengan kondisi terkini, tentu Bappenas mengupayakan adanya optimalisasi potensi ekonomi lokal yang berbasis hijau agar tetap terealisasi secara berkelanjutan.

Fokus utama Bappenas saat ini adalah untuk mengatasi dampak *triple planetary crisis*, yaitu adanya dampak negatif perubahan iklim di Indonesia, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman biodiversitas agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Sebab, estimasi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat meningkat hampir 4 kali lipat dari Rp469 triliun (2025) menjadi Rp2.005 triliun pada tahun 2029. Beberapa agenda ekonomi hijau yang juga turut terdampak dari krisis geopolitik terkini, yaitu:

1. Fragmentasi rantai pasok teknologi hijau global
Hal ini dapat terjadi karena membuat kondisi peta risiko transisi hijau menjadi dinamis. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina pun telah membelah rantai pasok teknologi hijau yang memicu ketidakpastian investasi di sektor kendaraan listrik dan baterai.
2. Volatilitas harga energi fosil
3. Pergeseran rantai pasok mineral kritis

Berbagai dampak tersebut sedang diupayakan untuk diatasi dengan internalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 terutama dengan prinsip lestari yang diturunkan menjadi indikator (1) penerapan ekonomi hijau, (2) lingkungan hidup berkualitas, (3) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta (4) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain indikator tersebut, sasaran utama pemerintah adalah dengan memastikan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju *Net Zero Emission* serta mendorong pendapatan per kapita setara negara maju.

Anggi menambahkan dalam penjelasannya bahwa ekonomi Indonesia sedang diupayakan untuk bertransformasi ke konsep ekonomi hijau terutama dengan mendorong adanya dekarbonisasi industri melalui efisiensi sumber daya, pemanfaatan kembali limbah, dan mendorong energi terbarukan, serta efisiensi energi. Konsep ekonomi hijau adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan keberlanjutan lingkungan terutama dengan mengurangi emisi karbon yang turut berpadak pada investasi hijau, penerapan ekonomi sirkular, dan memperluas pengembangan keterampilan hijau.

Anggi menegaskan pada RPJMN pun telah dicantumkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi rambu-rambu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Roadmap ekonomi hijau pun sebenarnya sudah disiapkan oleh Bappenas untuk turut dihitung sebagai indeks ekonomi hijau untuk mengukur seberapa progresif pertumbuhan ekonomi hijau hingga di tahun 2045. Berbagai sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia saat ini dan strategis mendorong pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yaitu pertanian dan perkebunan; kehutanan; perikanan dan kelautan; manufaktur; energi; konstruksi; transportasi; dan air dan limbah.

Indeks ekonomi hijau saat ini hanya baru digunakan agregasinya hingga provinsi dengan memuat 15 indikator nasional dan 16 indikator di level provinsi. Contohnya di daerah terdapat penambahan indikator kualitas air permukaan dan kualitas udara termasuk penggunaan produktivitas sawit tiap provinsi. Sejauh ini, berdasarkan tren indeks ekonomi hijau nasional 2024 (61,46), pilar lingkungan dalam perhitungan indeks ekonomi hijau nasional paling rendah di antara pilar lainnya, yaitu ekonomi dan sosial. Sejauh ini tantangan yang memicu rendahnya skor di pilar lingkungan adalah karena rendahnya bauran energi terbarukan yang dimiliki Indonesia.

Anggi Putri turut menambahkan bahwa masih adanya besarnya investasi yang dibutuhkan yang harus didiversifikasi dengan pendanaan kreatif; adanya risiko keterlembatan transfer teknologi dan inovasi; termasuk persiapan migrasi ke *green jobs*. Peluangnya saat ini adalah bagaimana pemerintah sedang mengatur *carbon pricing* Perpres Nomor 110 Tahun 2025 untuk menjadi *supply* tambahan pendanaan dalam proses penguatan ekonomi berkelanjutan dan transisi energi. Intinya, Anggi menjelaskan sebenarnya menghadapi dinamika geopolitik, Indonesia memiliki sumber daya yang sangat potensial untuk mengembangkan energi terbarukan, seperti panas bumi dan matahari. Jangan sampai dominasi bahan bakar fosil di Indonesia tidak diputus

ataupun komoditas mineral di Indonesia justru diekspor tanpa pengolahan terlebih dahulu yang sebenarnya strategis untuk mendorong nilai jual.

Putu pun menyinggung terkait strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan potensi *green jobs* yang juga dilematis karena adanya aktor informal juga, seperti pemulung dalam tata kelola persampahan. Anggi merespons bahwa saat ini Bappenas pun melalui Direktorat Ketenagakerjaan mengupayakan agar proporsi penerima peningkatan kapasitas keterampilan hijau dapat proporsional secara gender. Tidak hanya itu saat ini Bappenas selalu mengupayakan agar seluruh pilar pembangunan terkait lingkungan dapat diintegrasikan dengan sektor prioritas pembangunan pemerintah terkini. Misalnya, Bappenas aktif memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk memastikan adanya mekanisme pengelolaan sampah makanan secara akuntabel yang diproduksi pasca program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pun sudah menjelaskan adanya kewajiban pemenuhan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan KLHS untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan bisnis bisa bertanggung jawab secara lingkungan. Kemudian, Anggi Putri turut menambahkan bahwa siklus perencanaan dan pembangunan Bappenas selalu dimulai dengan tekad orkestrasi antara K/L dan pemerintah daerah agar semua pihak bisa mengetahui peran masing-masing dalam agenda pembangunan, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). Sebenarnya, forum-forum tersebut pun sudah berusaha untuk mengundang aktor masyarakat sipil/non pemerintah, contohnya terkini sedang dalam pengadaan forum diskusi skema pelaksanaan *carbon pricing*.

Secara tata kelola persampahan, saat ini secara teknis lebih dikoordinir oleh K/L spesifik. Jadi, saat ini belum ada output spesifik untuk menjangkau sektor informal dalam tata kelola persampahan. Sejauh ini Bappenas sudah berkolaborasi dengan Low Carbon Development Initiative (LCDI) untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk memberdayakan aktor informal, terutama seperti pemulung yang selama ini kontribusinya sangat tinggi dalam proses manajemen sampah dan daur ulang. Namun, dengan catatan, pemerintah juga menghadapi dilematis karena tidak semua aktor informal untuk berkenan pekerjaannya diformalkan. Bappenas kini selalu tetap mendorong pengelolaan sampah berbasis hulu agar membantu menyelesaikan akar masalah tantangan pengelolaan sampah yang dialami masyarakat. Contohnya, seperti adanya penolakan retribusi pengelolaan sampah yang biasanya dikenakan kepada masyarakat saat mengirim sampah ke fasilitas yang ada.

Menutup rangkaian diskusi, Anggi Putri berpesan harapannya masyarakat dapat selalu proaktif dan tetap mendukung pemerintah dalam merumuskan agenda pembangunan yang lebih relevan secara kolektif dan bermakna. Beliau berpesan agar berbagai penulisan kajian bisa tidak *mismatch* dan *align* dengan agenda kebijakan dan peta jalan Indonesia ke depannya.